



## Dewan Pastikan Panggil Gubernur Ahok

**MEMASUKI** Agustus 2015, Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) belum juga melaporkan pertanggungjawaban keuangannya. Oleh karena itu sejumlah kalangan meminta kalangan DPRD DKI untuk menolak laporan keuangan DKI Jakarta 2014

Pengamat Kebijakan Publik, Amir Hamzah mengatakan, apabila mengacu pada Peraturan Peraturan (PP) Nomor 58 Tahun 2005 yang mengatur Keuangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur kalau pemerintah daerah harus melaporkan keuangannya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

"Jadi kalau menurut undang-undang, Ahok seharusnya melaporkan keuangan APBD 2014 itu pada Juni lalu. Saat ini sudah masuk Agustus dan laporan keuangan itu belum juga diberikan," jelasnya. Dengan demikian, kata Amir juga, sudah sepatutnya dewan berani untuk menolak pertanggungjawaban Gubernur Basuki terhadap penggunaan APBD 2014.

"Dewan harus berani bersikap. Karena ini bicara undang-undang," ungkapnya juga. Bahkan berbicara penyimpangan anggaran selama 2014, diantaranya terkait soal pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang menyatakan kalau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemprov DKI meraih predit wajar dengan pengecualian (WDP).

"Dari mulai terjadinya kasus UPS dan kasus-kasus penyimpangan lainnya dalam penggunaan APBD 2014, kepala daerah yang harusnya yang bertanggungjawab penuh," ungkapnya juga. Seperti pernah diberitakan INDOPOS sebelumnya persetujuan kembali terjadi antara Gubernur Ahok dengan mitra kerjanya, DPRD DKI.

"Kami akan memanggil Ahok, atas kasus korupsi yang terjadi pada masa pemerintahannya. Saya sendiri yang akan menjadi inisiantor atas pemanggilan Ahok tersebut," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Lulung Lunggana kepada wartawan, kemarin (3/7).

Kata Lulung juga, ada alasan kenapa dirinya beserta temen-temennya sesama anggota DPRD DKI harus melakukan pemanggilan terhadap Ahok. Alasan itu diantaranya adalah, adanya kasus korupsi pada masa Ahok menjadi gubernur.

Dua kasus korupsi itu tidak lain adalah kasus yang saat ini sedang ditangani Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, yakni kasus pengadaan alat uninterruptible power supply (UPS) dan kasus pengadaan printer dan scanner atau pemindai.

Lulung juga mengatakan, kasus korupsi tersebut tidak lepas dari tanggung jawab Ahok sebagai Gubernur DKI. Lulung juga mengatakan, Ahok akan dimintai penjelasannya dalam pemanggilan oleh DPRD DKI tersebut.

Saat ini, kata Lulung juga, dia tengah mempersiapkan pemanggilan orang nomor satu di Pemprov DKI itu bersama dengan pimpinan DPRD lainnya. Ketua DPW PPP versi Djan Farid itu juga mengatakan, undangan pemanggilan kepada Ahok akan disampaikan secepatnya. (pes)